

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

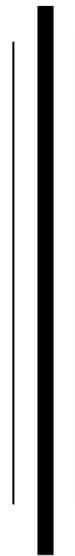


RENCANA KERJA

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

POLDA KEPULAUAN RIAU

T.A. 2020



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPRI
NOMOR : KEP/ 2 /I/2020 TANGGAL 3 JANUARI 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	Latar Belakang
1.	Kondisi Umum 1
a.	Perkembangan aspek kehidupan 3
b.	Analisa SWOT 13
2.	Identifikasi Masalah 16
BAB II.	Tujuan dan Saran
1.	Visi dan Misi 17
2.	Tujuan 18
a.	Polda Kepri 18
b.	Bidhumas Polda Kepri 18
3.	Sasaran Prioritas 19
a.	Polda Kepri 19
b.	Bidhumas Polda Kepri 19
BAB III.	Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepri 19
2.	Arah Kebijakan dan Strategi Bidhumas Polda Kepri 33
BAB IV	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
1.	Program dan Kegiatan 35
2.	Pagu Indikatif Bidhumas Polda Kepri 36
BAB V	Penutup36



KEPUTUSAN

Nomor : Kep/ 2 /I/2020

tentang

**RENCANA KERJA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A 2020, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4158);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/572/XI/2009 tanggal 2 November tahun 2009 tentang draft akhir panduan Penyusunan Rencana Kerja lingkungan Polri;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

10. Peraturan

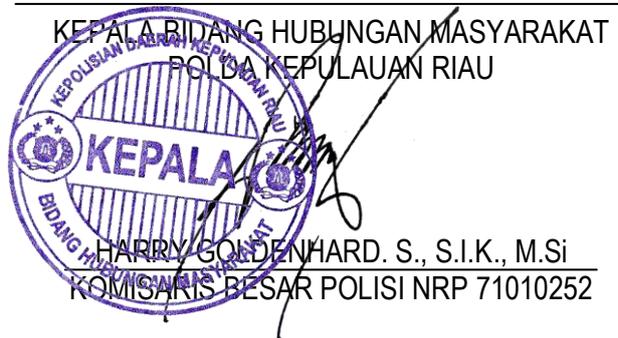
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek);
11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/370/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : KEP/276/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020;
 2. Pagu Indikatif Satker Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU T.A. 2020.
1. Rencana Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020, agar dipedomani dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas bagi Satker dan Sub Satker Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batam
pada tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan :

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Irwasda Polda Kepri.
4. Karorena Polda Kepri.

RENCANA KERJA BIDHUMAS KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari tahapan rencana strategis Bidhumas Polda Kepulauan Riau 2020-2024 dengan visi terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern di bidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Tahun 2020 sudah memasuki tahap akhir grand strategi Polri 2005-2025 pada tahap excellence yaitu pemantapan pelayanan masyarakat yang prima yang didukung dengan sinergi polisional yang produktif dan sumber daya manusia yang unggul guna menghadapi berbagai tantangan tugas. Rencana Kerja Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 disusun memperhatikan arah dan kebijakan Polda Kepulauan Riau melalui program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional modern dan terpercaya dengan visi terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Bidang Hubungan Masyarakat merupakan bagian dari satker Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat di tingkat Kepolisian Daerah, mengelola informasi, penyajian data, dokumentasi yang dapat diakses masyarakat, melaksanakan kerjasama dan Anev kegiatan tugas Bidhumas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunan Rencana Kerja T.A 2020 akan memperhatikan arah dan kebijakan Polda Kepulauan Riau yang sudah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah khususnya di bidang kehumasan serta melaksanakan program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya yang disinergikan dengan visi dan misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan diantaranya dapat mempublikasikan keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, menyediakan informasi secara online kepada masyarakat serta adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh segenap Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran yang didukung oleh pihak-pihak terkait baik unsur Pemerintah, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat serta Pemerintah terhadap pelayanan Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang lebih baik.

Keberhasilan yang sudah diraih Bidhumas Polda Kepulauan Riau diharapkan dapat membuat Bidhumas Polda Kepulauan Riau semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya tuntutan dan harapan masyarakat maupun pemerintahan daerah untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dalam memelihara situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, terlaksananya penegakan hukum yang profesional serta meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian.

Tugas Bidhumas Polda Kepulauan Riau kedepan masih dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat di penuhi. Masyarakat menuntut dan mengharapkan agar Polri mampu mewujudkan: (1) Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional, nasional dan lokal sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah - olah telah menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya daerah yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialistis, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Dalam perkembangan lingkungan strategis nasional dapat dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah diantaranya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, krisis ekonomi, ketenagakerjaan dan kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Semua isu strategis baik global, regional, nasional dan lokal harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidhumas Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.

Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai unit pelayanan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah selalu berupaya mencapai kinerja yang optimal dengan kegiatan yang mengarah kepada penciptaan opini yang positif bagi anggota Polri khususnya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang aman, tertib, dan lancar serta patuh hukum sehingga terarah kepada Renstra Polri tahun 2020 – 2024 yang bermuara kepada pencapaian strategi membangun kemitraan.

Sebagai unit kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bidhumas merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yang bertugas menyediakan informasi dan dokumentasi kinerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kepada masyarakat serta membangun opini positif tentang kinerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di mata masyarakat.

a. **Perkembangan Aspek kehidupan**

1) Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

- a) upaya pemerintah Indonesia menghadapi transformasi global yang tertuang dalam SDG (*Sustainable Development Goals*) 2016-2030 sebagai kelanjutan dari MDG (*Millennium Development Goals*) 2000-2015. Hal ini merupakan upaya pemerintah Indonesia merespon perkembangan dunia internasional yang sejalan dengan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan konsep Nasional (Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019). Agenda global tersebut harus mengedepankan kepentingan nasional sesuai kemampuan bangsa, khususnya di level daerah. Dalam artian tidak perlu mengikuti semuanya, namun cukup memilih dan berfokus pada hal-hal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- b) Indonesia melakukan ratifikasi atas *Paris Agreement* merupakan kebijakan Indonesia dalam merespons kebijakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2016-2030 yang diprakarsai PBB demi mewujudkan salah satu pointnya untuk membangun beraskan lingkungan dan perubahan iklim. *Paris Agreement* yang ditetapkan di COP-21, bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius pada akhir abad ini dengan menurunkan emisi global menjadi 40 giga ton pada 2030, Oleh Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC pada saat itu, kesepakatan ini dinilai sebagai modal kontrak sosial dunia baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global;
- c) Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di negara berkembang Asia Timur termasuk Indonesia dan Pasifik akan tetap bertahan. Meskipun demikian, kawasan ini dinilai masih menghadapi berbagai risiko besar untuk tumbuh. Oleh sebab itu, Bank Dunia menyatakan sejumlah negara perlu mengambil langkah guna mengurangi kerentanan finansial dan fiskal;
- d) Bank Dunia memperkirakan Tiongkok akan terus melakukan transisi ke pertumbuhan yang lebih lambat namun berkelanjutan. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mencapai 6,7 persen pada 2016, 6,5 persen di 2017, dan 6,3 persen di 2018. Di Tiongkok, pertumbuhan akan melemah sejalan dengan perekonomiannya yang terus menuju sektor konsumsi, jasa, dan aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi dan kelebihan kapasitas industri dikurangi. Namun, pasar tenaga kerja yang lebih ketat akan terus mendukung pertumbuhan pendapatan dan konsumsi rumah tangga;
- e) warga dunia yang tidak lagi mempersoalkan kebangsaan, kecenderungan untuk bekerja di negara lain, bermigrasi, bahkan pindah kewarganegaraan lain semakin menguat di berbagai bangsa, terutama di kalangan muda. Perhatian generasi muda dalam masa lima tahun mendatang dan seterusnya terhadap aspek global akan semakin menguat, melampaui batasan kebangsaannya masing-masing;

- f) kampanye yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengajukan diri menjadi anggota DK PBB merupakan usaha bagi bangsa Indonesia dimana Indonesia dinilai bisa lebih berperan untuk mereformasi PBB agar multilateralisme berlaku efektif.

2) Regional

a) Indonesia dengan Cina

Ketegangan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Cina terkait batas perairan di wilayah Natuna, Laut Natuna Utara Hal tersebut bermula adanya dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia dan kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sempat menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau namun Negara Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, kapal nelayan dari negaranya menangkap ikan di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi.

b) Indonesia dengan Malaysia

(1) Permasalahan batas wilayah di selat Malaka yaitu Pada tahun 1969 Malaysia mengumumkan bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar seseuai ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya Indonesia telah lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil laut;

(2) Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda Van Doorn tahun 1906. Malaysia pun tak mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935;

(3) Masalah baru timbul dalam MOU antara team Border Comeete Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.

c) Indonesia dengan Singapura

Permasalahan batas wilayah Di sebelah utara Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulau-pulau menjadi daratan yang luas.

3) Nasional

3) Nasional

Lingkungan strategis Nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis Nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, isu-isu strategis tersebut sebagai berikut :

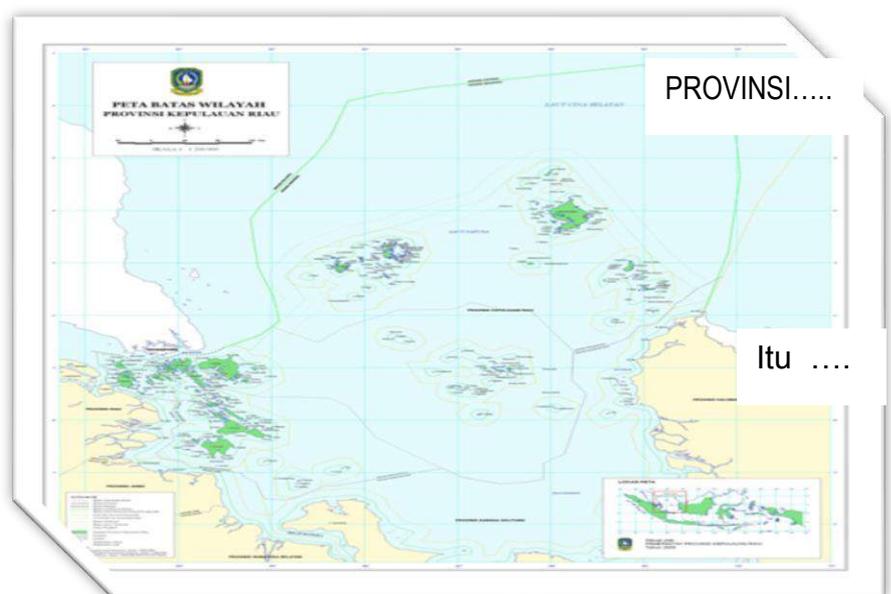
- a) wilayah Indonesia yang sangat luas terutama wilayah perairan/laut, apabila tidak dilakukan pengawasan ketat, merupakan kerawanan berbagai permasalahan kejahatan lintas batas antar negara dan keluar masuknya barang dan pelaku aktivitas ilegal di Perbatasan sebagai ancaman gangguan keamanan. Wilayah perairan selat Malaka, Natuna dan Sulu rawan perompakan laut;
- b) Indonesia salah satu negara memiliki jumlah penduduk sangat besar yaitu 257.912.349 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,2 %, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai masalah konflik sosial antar warga maupun masyarakat;
- c) Pelaksanaan Pilkada secara serentak Tahun 2020 yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 Provinsi, 30 Kota dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada;
- d) Ancaman terorisme dan kelompok jaringan ISIS diwilayah Asia tenggara yang terjadi di Marawi Filipina akan berdampak pada stabilitas keamanan Nasional;
- e) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme dan ideologi lain) dalam bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui mass media. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;
- f) kebijakan Otonomi Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- g) terbatasnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan telah berdampak terjadinya pelanggaran batas teritorial kelautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan perbatasan dan masih lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi meningkatnya gangguan terhadap sumber kekayaan laut dan habitatnya;
- h) sengketa Pertanahan yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan. Disisi lain Penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal;
- i) permasalahan

- i) permasalahan ketenagakerjaan masih diwarnai dengan tumbuh suburnya organisasi-organisasi buruh di Indonesia; maraknya tuntutan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh; hubungan bipartit dan tripartit yang tidak harmonis; persaingan memperoleh lapangan pekerjaan; dan maraknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS ilegal;
 - j) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri;
 - k) pelaksanaan Ujian Nasional secara serentak di tingkat SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA yang perlu pengamanan dari Kepolisian.
- 4) Daerah
- Perkembangan kehidupan Propinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu Trigatra (Geografis, Demografi dan sumber daya alam) dan aspek Astagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Keamanan) sebagai berikut :

a) Kondisi Geografis, Demografi dan sumber daya alam

(1) Geografis

Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi tersebut juga mengandung kerawanan terhadap keamanan negara dalam bentuk sengketa perbatasan dan kejahatan lintas negara serta beberapa kejahatan lainnya.



- (a) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada :
- 1) 5°,01° Lintang Utara s/d 0°,40°Lintang Selatan.
 - 2) 103°,15° Bujur Timur s/d 109°,10° Bujur Timur.

(b) Dengan

- (b) Dengan Batas Wilayah antara lain :
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Laut Cina Natuna Utara;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.
- (c) Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 251.810,71 Km² dengan luas wilayah daratan 10.595,41 Km² (4,21%), luas wilayah laut/Perairan 241.215,30 Km² (95,79%) yang meliputi 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari:
- belum bernama sebanyak 1.865 pulau;
 - bernama sebanyak 543 pulau;
 - berpenghuni sebanyak 366 pulau (15%);
 - tidak berpenghuni sebanyak 2.042 pulau (85%);
 - pulau terluar sebanyak 52 pulau;
 - pulau terdepan sebanyak 19 pulau.
- (d) Curah hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2000 mm/th dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 82-86 %, musim hujan terjadi pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau antara bulan April s/d Oktober, namun akibat pengaruh pemanasan global, sehingga mengalami pergeseran waktu yang tidak menentu;
- (e) Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal berdirinya adalah 1 Juli 2004 dengan ibu kotanya di Kota Tanjungpinang. Kepulauan Riau terdiri dari 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
- Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 3.990 Km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.283.196 jiwa. Letak Kota Batam yang sangat strategis, berhadapan langsung berhadapan langsung dengan Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ);
 - Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan jumlah penduduk sekitar 207.057 jiwa, Kota Tanjungpinang sempat menjadi ibukota Provinsi Riau yang pertama, namun sejalan dengan perkembangannya sesuai dengan SK Mendagri No.5 tanggal 21 Juni 2001 Kota Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonomi;

- Kabupaten Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 50 (lima puluh) wilayah Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 58.003,25 Km² dan jumlah penduduk sekitar 156.313 jiwa. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ), selain juga dikenal sebagai pusat pariwisata terpadu dan memiliki kawasan industri yang terus berkembang;
- Kabupaten Karimun dengan letak ibukotanya di Tanjungbalai Karimun, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan dan 42 (empat puluh dua) Desa dengan luas wilayah sekitar 167.850 Km² dan jumlah penduduk sekitar 229.194 jiwa memiliki keunggulan tersendiri karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga merupakan salah satu basis pertumbuhan IMS – GT (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle) serta merupakan salah satu kawasan *Free Trade Zone* (FTZ);
- Kabupaten Lingga dengan ibukota Dabo Singkep terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan, luas wilayah sekitar 211.772 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 89.330 jiwa, daerah Kabupaten Lingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan pertanian;
- Kabupaten Natuna letak ibukotanya di Ranai terdiri dari 12 (duabelas) Kecamatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 141.901,2 Km² dan jumlah penduduk sekitar 76.192 jiwa, sedangkan luas lautan 97,72 Km², merupakan daerah yang kaya dengan minyak dan gas bumi;
- Kabupaten Anambas yang merupakan pemekaran dari Kab. Natuna letak ibukotanya di Tarempa terdiri dari 7 Kecamatan dengan jumlah penduduk 41.412 jiwa.

(2) Demografi

Jumlah Penduduk dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan pertengahan Tahun 2018 sebanyak **2.082.694** jiwa dengan perincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH
1	2	5
1	Kota Batam	1 283 196
2	Kota Tanjungpinang	207 057
3	Kab. Karimun	229 194
4	Kab. Bintan	156 313
5	Kab. Lingga	89 330

6. Kab. Natuna.....

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH
1	2	5
6	Kab. Natuna	76 192
7	Kab. Anambas	41 412
Jumlah		2.082.694

(3) Sumber Daya Alam

- (a) Minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Natuna merupakan salah satu andalan bagi pemasukan devisa negara dengan sistem bagi hasil yang saat ini dikelola oleh:
- PT. Conoco Philips;
 - PT. Premier Oil Natuna;
 - PT. Peralahan Arnebatara Natuna;
 - PT. Star Energi Natuna.
- (b) Potensi sumber daya mineral dan energi relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir dan kuarsa. Manfaatnya selain sebagai sumber devisa negara pengelolaan yang kurang tepat akan berdampak pada kerusakan ekosistem.
- (c) Potensi kelautan sangat mendukung bagi pembangunan usaha budidaya perikanan. Di Kabupaten Karimun terdapat budidaya ikan kakap, budidaya rumput laut dan kerambah jaring apung. Sedangkan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat kota / kabupaten tersebut juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di Pulau Setoko Batam terdapat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih pertahunnya. Pelabuhan perikanan swasta Telaga Punggur Batam yang letaknya strategis karena berhadapan dengan jalur lintas kapal penangkapan ikan antara Kepulauan Riau, ZEEI, Laut Cina Selatan dan Singapura yang dapat meningkatkan ekspor hasil laut dan menambah PAD. Namun kondisi tersebut juga mengandung berbagai kerawanan, diantaranya pencurian ikan oleh kapal – kapal asing yang dilengkapi dengan peralatan modern dan penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan bahan peledak;
- (d) Pertanian dan peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Karimun dan Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nanas serta cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Lingga sangat cocok untuk

ditanami buah – buahan dan sayuran. Di beberapa pulau lainnya di Kepulauan Riau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit;

- (e) Pariwisata. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan tiap tahunnya lebih dari satu juta orang. Obyek wisatanya antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kota dan Kabupaten yaitu: Di Batam pantai melur, Pulau Abang dan Pantai Nongsa, Di Karimun pantai Pelawan, Di Bintan Pantai Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leisure Park. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling. Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata seperti cagar budaya, makam – makam bersejarah, tarian – tarian tradisional serta event – event khas daerah. Di Tanjungpinang terdapat pulau Penyengat yang terkenal bersejarah karena terdapat masjid bersejarah, makam – makam Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji yang kedua – duanya adalah pahlawan nasional. Lokasi wisata terkenal lainnya yaitu di Lagoi Bintan, luasnya 23.000 Ha dan kawasan industri terpadu di daerah Lobam, seluas 4.000 Ha, kawasan wisata tersebut dikembangkan dan dikelola dengan konsep profesional oleh pihak swasta dan baru dimanfaatkan sekitar 3.000 Ha, disamping itu untuk kawasan pengembangan sumber air ditetapkan di Teluk Bintan seluas 37.000 Ha;
- (f) Daerah Kota Batam dikenal sebagai kawasan pengembangan Industri, Perdagangan, Galangan Kapal dan Pariwisata yang telah banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dikenal sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ).

b) Idiologi:

- 1) Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, belum ada indikasi kelompok / aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila. Namun demikian masih adanya kelompok / suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepulauan Riau yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir – pinggir pulau wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat tersebut kemungkinan besar belum memiliki pendidikan / pengetahuan yang cukup tentang Pancasila sebagai idiologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
- 2) Suku laut tersebut bahkan dikenal menganut animisme atau mengkeramatkan suatu benda atau daerah dikarenakan pengaruh minimnya fasilitas pengetahuan tentang keagamaan dan sifat turun temurun yang sudah membudaya. Dengan demikian salah satu nilai Pancasila yang mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk mempercayai adanya Tuhan YME masih belum terlaksana sepenuhnya. Namun setidaknya suku laut ini belum ada indikasi untuk melakukan upaya mendiskreditkan Pancasila ataupun membuat ideologi baru karena aktivitas utama hingga saat ini adalah melaut dan berburu di Hutan;

- 3) Bergesernya nilai - nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan / kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik / lokasi usaha tertentu dengan tujuan melakukan dominasi dalam hal "pengamanan" sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mengatasnamakan suku tertentu yang seakan - akan berlatarbelakang SARA.

c) Politik:

- 1) Secara umum situasi politik di Kepulauan Riau cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa kebijakan pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan / cara-cara yang baik dan produktif;
- 2) Permasalahan Gugatan atas PAW H. Lamén Sarihi, SH. MH dari Jabatan sebagai Ketua DPRD Bintan yang mana saat ini H. Lamén Sarihi, SH. MH tetap bersikukuh bahwa pihaknya merupakan Ketua DPRD Bintan periode 2014 – 2019, sehingga dengan adanya upaya PAW yang dilakukan oleh H. Nesar Ahmad, S.IP maka pihaknya akan melawan dengan Gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- 3) Pada Tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang;
- 4) Dalam hal pemberdayaan pulau – pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing;
- 5) Rencana pemekaran wilayah terhadap Kabupaten Kep. Kundur, Kota Natuna, Kab. Natuna Selatan, Natuna Barat yang diusulkan Gubernur Kepulauan Riau ke Mendagri dengan nomor surat : 130-/0188/set tanggal 26 Februari 2016;
- 6) Adanya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam, dimana sama – sama memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah Kota Batam. Kedua instansi tersebut berpegang kepada peraturan Perundangan masing – masing sehingga berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.

d) Ekonomi:

- 1) Tumpang Tindih dan Duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang dimana ada banyak aturan bahkan undang – undang tentang FTZ yang dinilai tidak efektif. Hal tersebut berdampak adanya wacana tentang pembubaran terhadap BP Batam;
- 2) Adanya permasalahan tentang kampung Tua yang dimana keberadaan Kampung Tua di Kota Batam sangat dipertahankan oleh masyarakat kota Batam terutama suku asli karena terdapat Tapak Perkampungan, situs

purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, silsilah keluarga melayu yang menginginkan kepastian status dari BP Batam;

- 3) Penolakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memberatkan warga masyarakat Kota Batam;
- 4) Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti adanya moda transportasi berbasis online yang menimbulkan pengaruh positif maupun negative, untuk dampak positif mempermudah dan memberikan kenyamanan masyarakat, sedangkan dampak negative menimbulkan penolakan moda transportasi konvensional;
- 5) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau bukan daerah penghasil kebutuhan konsumtif (sembako) sehingga untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau menggantungkan supply dari luar Kepulauan Riau. Hal ini menimbulkan spekulasi / import ilegal / penyeludupan sembako ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam);
- 7) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (Over Haul) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN.

e) Sosial Budaya:

- 1) Unjukrasa dan Mogok Kerja di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang disebabkan perselisihan industrial, dari perusahaan merasa sudah memberikan upah layak bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara mengingat mahal dan terbatasnya lahan di Batam dan adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Penguasaan (BP) Pulau Batam. Disisi lain pihak buruh beranggapan pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas kemudahan kepada pengusaha di Batam namun tidak memikirkan kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh sedangkan dalam perumusan upah minimum kota (UMK) hanya mencapai 60% dari KHL bagi kesejahteraan buruh ;
- 2) Permasalahan pendirian Rumah Ibadah dan aktivitasnya di wilayah Kota Batam dan Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah. Kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadah;
- 3) Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam);

4) Krisis

- 4) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (OverHaul) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang disistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN.

f) **Keamanan:**

Kejahatan beberapa kasus kriminalitas / kejadian umum yang bersifat konvensional dan menonjol masih akan terjadi pada tahun 2019 diantaranya adalah : Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi / sajam, penganiayaan, jambret dan modus lainnya yang dapat berkembang sesuai dengan situasi. TKP jalanan sepi, perumahan, perkantoran, ruko, tempat hiburan. Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong / merusak gembok pintu / pagar, congkel jendela / pintu, merusak atap dsb. TKP pemukiman, pertokoan, perkantoran, obyekvital, ruko dan Curanmor yang umumnya dilakukan dengan modus merusak kunci stang dan merusak gembok. TKP parkir yang sepi, halaman rumah / ruko dan meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba.

b. **Analisa SWOT**

Untuk menyusun kebijakan dan strategi yang tepat untuk dilaksanakan oleh Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor – faktor yang akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas baik dari internal berupa aspek kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yang merupakan aspek peluang dan tantangan melalui metode SWOT.

1) **Kekuatan (Strengths)**

- a) Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab terkait dengan pelayanan informasi publik baik untuk internal Polri maupun Publik dan pembentukan citra positif Polri.

- b) Personil;

Jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah 34 Orang.

NO	URAIAN	PANGKAT					JUMLAH POLRI	PNS	TOTAL
		PATI	PAMEN	PAMA	BA	TA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	BIDHUMAS	-	5	4	24	-	33	1	34
JUMLAH		-	5	4	24	-	33	-	34

c) Materil dan Fasilitas:

(1) Kendaraan Ranmor R-6, R-4, dan R2;

NO	KONDISI			JML
	R-6	R-4	R-2	
1	2	3	4	5
-	-	4	5	9
JUMLAH		4	5	9

(2) Bangunan;

(a) Mako

Bidhumas menempati bangunan / gedung utama Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lantai I;

(b) Rumdin;

Rumah Dinas Kabidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) Unit dan Rumah Pamen Humas sebanyak 1 (satu) Unit sudah terisi.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- Masih banyaknya ruang jabatan yang belum terisi hal ini disebabkan belum terpenuhinya jumlah Personel sesuai DSP;
- Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas khususnya yang berkenaan dengan kendaraan dinas baik R4 dan R2 serta Alsus;
- Belum meratanya kemampuan Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai akibat dari masih kurangnya kesempatan bagi Personel yang dapat diikuti dalam diklat, dikbang, dan dikbangspes.
- Wilayah Kepulauan Riau 96% adalah perairan dan pada musim-musim tertentu cuaca buruk selalu muncul sehingga dapat mengganggu jalur lalu lintas laut (Kapal reguler) dan penerbangan antar pulau dalam wilayah Kepulauan Riau. Hal ini juga dapat menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

3) Peluang (Opportunities)

- Penyelesaian pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus yang cepat, tepat, dan akurat oleh Personel Bidhumas akan dapat membangun suatu hubungan tata cara kerja yang harmonis serta dapat menciptakan peluang terbukanya hubungan lintas sektoral dengan instansi / lembaga lainnya;
- Reformasi di tubuh Polri diharapkan dapat merubah kultur kearah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;

- c) Era keterbukaan Informasi publik saat ini dan dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi serta dukungan masyarakat dan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. maka diharapkan kepada anggota untuk dapat lebih cepat dan tanggap dalam memberikan penerangan dan informasi yang transparan kepada masyarakat.

4) Ancaman (Threats)

- a) Perkembangan teknologi dan informasi, disamping berdampak positif sebagai inovasi dibidang ilmu pengetahuan, juga kerap disalah gunakan oleh pelaku kriminal untuk melakukan tindak kejahatan;
- b) Kecenderungan meningkatnya empat jenis kejahatan (Konvensional, transnasional terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- c) Gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di beberapa daerah yang disebabkan oleh berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;
- d) Tingginya angka pengangguran di Batam sebagai akibat dari enggannya investor asing menanamkan modalnya di Batam karena tidak ada kepastian hukum, regulasi tidak memihak kepada investor, panjangnya rantai birokrasi perijinan dan rancunya berbagai peraturan pajak.
- e) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- f) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum dilapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu masalah;
- g) Posisi Batam sebagai Kota industri dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mempunyai konsekuensi menjadi kiblat seluruh wilayah/daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di daerah akan dibawa ke Batam untuk mendapatkan penyelesaian yang dinilai adil. Disamping itu juga kota Batam menjadi pintu masuk berbagai hal dari luar negeri, sehingga kota Batam juga mengemban tugas sebagai etalase bagi masyarakat Internasional dalam memandang Indonesia;
- h) Batam sebagai Kota Industri menarik berbagai masyarakat di seluruh Indonesia untuk datang termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang *unskill*/tidak memiliki keterampilan, akibatnya Batam dipenuhi oleh problematika sosial yang pada akhirnya bermuara pada gangguan Kamtibmas seperti meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS dan lain-lain, sehingga perlu kesiapan Polri dalam melayani masyarakat;
- i) Dalam implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Buruh / Mahasiswa/ Ormas/ LSM/ kelompok masyarakat lainnya, terdapat kecenderungan pelaksanaan unjuk rasa yang tidak

terkendali

terkendali/ kebablasan/melanggar hukum, bahkan disertai dengan tindakan anarkis, seperti mengganggu keamanan, dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum/milik negara, menghina Presiden/pejabat tertentu/lambang negara tertentu, melakukan fitnah, Merusak rumah/kendaraan/barang milik orang lain dan menyerang petugas/aparat keamanan;

- j) Masih banyak terjadi tumpang tindih dokumen kepemilikan tanah di wilayah Batam dan Tanjungpinang bila diselesaikan secara hukum akan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pihak-pihak yang terlibat untuk menguasai secara fisik, tidak segan-segan menyewa dan menggunakan jasa preman. Hal demikian sangat rawan terjadi bentrok antar preman dengan membawa etnik kedaerahan asal mereka;
- k) Wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 1 2. Identifikasi.....
 besar dan kecil terdiri dari 1.068 berpenghuni dan 800 tik
 % perairan dan 4 % daratan serta memiliki pelabuhan laut baik pelabuhan domestik, internasional maupun pelabuhan *illegal* (tikus) yang merupakan wilayah transit bagi mobilitas orang dan barang, hal tersebut menjadi peluang bagi masuknya barang-barang ilegal serta pelarian dan persembunyian para pelaku kejahatan Narkoba, teroris dan dari daerah/Negara lain.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan kompleks. Sehingga mengharuskan Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan pelayanan yang optimal, proaktif, transparan dan akuntabel. Secara umum permasalahan yang dihadapi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan kepada pimpinan agar terwujudnya pelayanan yang optimal, transparan dan akuntabel;
- b. Perlunya meningkatkan profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar dapat mengemban tugas secara profesional sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat;
- c. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar Personel Bidhumas dan instansi terkait didalam melaksanakan tugas kedinasan sehingga dalam pencapaian sasaran akhir dari tugas yang diembannya belum optimal;
- d. Belum tercukupinya jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengisi jabatan sesuai DSP seperti yang tertuang didalam Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2018 sehingga rangkap tugas dan tanggung jawab menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan tugas yang diemban;
- e. Belum terdukungnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, seperti kendaraan dinas R4 dan R2 serta masih kurangnya alat khusus penunjang pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

- 1) Visi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib.
- 2) Misi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

b. Visi dan Misi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

- 1) Visi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern dibidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
- 2) Misi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
 - a) Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarpras, Sismet, anggaran menuju Front Office Polri;
 - b) Menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat dan pelaku komunikasi;
 - c) Mencari, menghimpun, mengolah, mendistribusikan, menyimpan informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah;
 - d) Mendukung kegiatan Kepolisian dan Operasi Kepolisian;
 - e) Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang sudah diberlakukannya UU KIP, sehingga realisasi Humas Polri sebagai Front Office perlu segera diwujudkan. Karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana prasaran berbasis TI, sistem dan metoda serta anggaran yang memadai.

2. Tujuan

a. Tujuan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polda Kepulauan Riau yang professional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polda Kepulauan Riau.
- 5) Menerapkan manajemen Polda Kepulauan Riau yang terintegrasi dan terpercaya..

b. Tujuan Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

- 1) menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat di tingkat Kepolisian Daerah, mengelola informasi, penyajian data, dokumentasi yang dapat diakses masyarakat, melaksanakan kerjasama dan Anev kegiatan tugas Bidhumas;
- 2) menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen Personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidhumas;

3. Menyelenggarakan.....

- 3) menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media masa;
- 4) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan informasi baik internal maupun eksternal;
- 5) melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, meningkatkan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisis, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital, media online maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif.

3. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020

- 1) **Pertama** "Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan bermartabat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau";
- 2) **Kedua** "Pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang prima berbasis TIK";
- 3) **Ketiga** "Penegakan hukum Polda Kepulauan Riau secara berkeadilan dan terpercaya";
- 4) **Keempat** "Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau yang sesuai standar";
- 5) **Kelima** "Peningkatan sarana prasarana Polda Kepulauan Riau";
- 6) **Keenam** "Regulasi dan Sistem Pengawasan, Polda Kepulauan Riau yang efektif dan terpercaya";

b. Sasaran Prioritas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 2020

Berdasarkan tahapan capaian Renstra Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020, maka sasaran prioritas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pertama** "Peningkatan Pelayanan Publik agar terwujudnya pelayanan yang optimal, transparan dan akuntabel";
- 2) **Kedua** "Peningkatan profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas secara promotor, selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat";
- 3) **Ketiga** "Peningkatan kerja sama antar Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, antar satker/satwil, instansi terkait dan media massa dalam rangka menyamakan persepsi dari kebijakan Kepala Kepolisian Daerah";
- 4) **Keempat** "Peningkatan jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengisi jabatan yang kosong sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas";
- 5) **Kelima** "Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau".

III. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Humanis dan Bermartabat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau”**, yaitu:
 - 1) penguatan peran Polda Kepulauan Riau dalam menjaga keamanan daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - Melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda Kepulauan Riau yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial.
 (giat3111,3112,3114,3115,3116,3117,3119/prog7/SP1/SS1/IKP1/prom3).
 - 2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
 (giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
 - b) melaksanakan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif.
 (giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8,11);
 - c) melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan fungsi Binmas.
 (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);
 - d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal.
 (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);
 - e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait.
 (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);
 - f) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya.
 (giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8).
 - 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Bhabinkamtibmas dengan komunitas yang ada di masyarakat.
 (giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
 - b) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
 (giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
 - c) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa.

(giat)

- (giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
- d) mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan di jalan untuk membantu pengamanan lingkungan.
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
- e) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila.
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
- f) memberdayakan pengamanan swakarsa;
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
- g) meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa.
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8).
- 4) Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas” untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas.
(giat3130/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat.
(giat3130/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- c) melaksanakan Quick Respons setiap permasalahan yang ada di masyarakat.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- d) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta pengamanan event Daerah, Nasional maupun internasional.
(giat3131/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- e) mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada kesatuan Brimob Polda Kepulauan Riau untuk setiap saat siap digerakkan ke daerah rawan dengan sarana dan prasarana yang cepat baik melalui udara, laut maupun darat.
(giat3147/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- f) memperkuat perlindungan anak dan wanita dengan pemberdayaan Polwan.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- g) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis.
(giat3130/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7).
- 5) Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) darat dan perairan/laut;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- b) penanganan kecelakaan lalu lintas.
giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- c) melaksanakan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas.
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- d) membangun RTMC dan TMC.
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- e) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum.

- (giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- f) melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (life jacket).
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- g) melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan Basarnasda Provinsi Kepulauan Riau serta stakeholder lainnya untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan di perairan/laut.
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- h) Melaksanakan operasi DVI (Disaster Victim of Identification) dalam mengidentifikasi korban laka laut dan bencana alam yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7).\
- 6) Terwujudnya keamanan di wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan patroli perairan, Binmas perairan dan sambang nusa sampai pulau-pulau terluar berpenghuni.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- b) meningkatkan pengamanan di wilayah perairan Polda Kepulauan Riau.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- c) Melaksanakan penegakan hukum di perairan.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- d) melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pembinaan terhadap masyarakat di pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas (Lokpri).
(giat5076/prog09/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- e) meningkatkan pengamanan di PLBN untuk menjamin keamanan di titik perlintasan batas antara Indonesia dengan Negara tetangga pada Pos pemeriksaan lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS).
(giat3130/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- f) koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7).
- 7) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polda Kepulauan Riau dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal:
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyiapkan personel Polda Kepulauan Riau untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi.
(giat5052/prog1/SP7/SS1/IKP1/prom7);
- b) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.
(giat5087/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan daerah yang kondusif.
(giat5087/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7).

- 8) Arah kebijakan “Pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020” dengan strategi :
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- a) melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawan Pilkada serentak Tahun 2020.
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - b) melaksanakan koordinasi dengan Penyelenggara dan peserta Pilkada serentak Tahun 2020 (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada).
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKU1/prom7);
 - c) mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada serentak Tahun 2020.
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - d) mempersiapkan asta siap Pilkada serentak Tahun 2020;
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - e) mempersiapkan Tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pilkada serentak Tahun 2020.
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - f) mempersiapkan system informasi teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020.
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - g) melaksanakan anev pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - h) membentuk tim Pamenwas, Pamatwil untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pengamanan tahapan Pilkada di jajaran Polda Kepulauan Riau.
(giat5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - i) melaksanakan deklarasi pemilu damai demi terwujudnya Pilkada damai dan sejuk di daerah hukum Polda Kepulauan Riau.
(giat5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - j) melaksanakan patroli skala besar di daerah hukum Polda Kepulauan Riau demi terwujudnya situasi kondusif pada penggelaran Pilkada serentak 2020.
(giat5077,5078,5079,5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7).
- 9) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian.
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - b) melakukan evaluasi terhadap Kerjasama yang sudah ada.
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - c) mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme.
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - d) menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital dan objek tertentu lainnya/pihak swasta.
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - e) menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas.
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - f) menjalin kerjasama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - g) melaksanakan operasi kepolisian dengan strategi menggelar operasi Kepolisian mandiri kewilayahan dan operasi cipta kondisi untuk mewujudkan keamanan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang kondusif.

(giat5080/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7).

- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pelayanan Publik Polda Kepulauan Riau yang Prima Berbasis TIK”, yaitu:
- 1) Pelayanan masyarakat dengan sistem yang berbasis Teknologi Informasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) evaluasi sistem pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang berbasis Teknologi Informasi dan melaksanakan inovasi terhadap pelayanan publik.
(giat3133/prog10/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11);
 - b) peningkatan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi.
(giat3133/prog10/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11);
 - c) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara online.
(giat3111/prog7/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11);
 - d) peningkatan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik complain online.
(giat3136/prog11/SP2/SS3 /IKP2/prom2,11);
 - e) peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara online;
(giat5065/prog3/SP2/SS3 /IKP3/prom2,11);
 - f) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Binmas dengan penerbitan KTA dan ijazah Satpam dan SIO (Surat Ijin Operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan).
(giat5076/prog9/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11);
 - g) peningkatan kualitas pelayanan dibidang Rekrutmen anggota Polri yang berbasis TIK.
(giat3107/prog06/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11);
 - h) mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik, call centre 110, CCTV dan video conference melalui sarana command centre sebagai pusat komando dan kendali operasional Polda Kepulauan Riau.
(giat3071/prog1/SP2/ SS3/IKP3/prom2)..
 - 2) Perbaiki kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan.
(giat5069/prog05/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11);
 - b) melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik Polda Kepulauan Riau khususnya pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK.
(giat3133/prog10/SP2/ SS3/IKP3/prom2,11).
 - 3) pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA).
(giat5067/prog5/SP2/SS3/IKP3/prom2);
 - b) mengintegrasikan.....

- b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.
 (giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
- c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada Reskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 (giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
- d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan.
 (giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
- e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK.
 (giat5060/prog2/SP2/SS3/IKP3/prom2);
- f) pengembangan SPKT berbasis TIK
 (giat5056/prog01/SP2/SS3/IKP3/prom9).
- 4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel:
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan.
 (giat5052/prog1/SP7/SS3/IKP3/prom6);
- b) menyusun/revisi SOP tentang quick respons Kepolisian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau.
 (giat5052/prog1/SP7/SS3/IKP3/prom6).
- 5) Manajemen media
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan Alsus Multi media Bidhumas Polda Kepulauan Riau.
 (giat5056/prog1/SP2/SS6/IKP10/prom2);
- b) peningkatan kerjasama dengan media cetak elektronik dan online.
 (giat5056/prog1/SP2/SS6/IKP10/prom2);
- c) peningkatan kegiatan multimedia melalui produk-produk multimedia.
 (giat5056/prog1/SP2/SS6/IKP10/prom2);
- d) peningkatan kapasitas alsus pengelola informasi dan dokumentasi (PID).
 (giat5056/prog1/SP2/SS6/IKP10/prom2).
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberantasan terhadap kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kelompok marginal serta kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.
 (giat3136/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom7);
- b) pemberantasan.....

- b) pemberantasan terhadap kejahatan di wilayah perairan seperti illegal fishing, perdagangan orang, pertambangan liar di laut, perompakan di laut dan tindak pidana perairan lainnya.
(giat3136/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom7);
 - c) peningkatan pengungkapan terhadap kejahatan tindak pidana umum, khusus dan Narkoba serta tindak pidana di perairan.
(giat3142,3143,3144,3145,3146/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom7);
 - d) peningkatan koordinasi antar penyidik di wilayah perairan Kepulauan Riau.
(giat3134/prog10/SP3/SS1/IKP2/prom7);
 - e) peningkatan kemampuan pemeriksa forensic dalam pengolahan tempat kejadian perkara (crime scene investigation/CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah.
(giat3136/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom7).
- 2) Peningkatan kemampuan penyidik Polda Kepulauan Riau;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan penyidik secara bertahap untuk mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal.
(giat5069/prog5/SP3/SS4/IKP4/prom4);
 - b) mengikutsertakan sertifikasi terhadap penyidik Polda Kepulauan Riau.
(giat5069/prog5/SP3/SS4/IKP4/prom4);
 - c) peningkatan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum.
(giat5069/prog5/SP3/SS4/IKP4/prom4);
 - d) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai Scientific Crime Investigation.
(giat3136/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9);
 - e) melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana.
(giat3136/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9).
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.
(giat3088/prog3/SP3/SS2/IKP2/prom9);
 - b) peningkatan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
(giat5086/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9);
 - c) membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan).
(giat5086/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9).

4) peningkatan.....

- 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Polda Kepulauan Riau;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antarsatker internal Polda Kepulauan Riau.
(giat5084/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9);
- b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak hukum.
(giat5084/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9);
- c) memperkuat pusat informasi kriminal daerah yang terintegrasi.
(giat5084/prog11/SP3/SS2/IKU3/prom9);
- d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP.
(giat5084/prog11/SP3/SS2/IKP2/prom9)

- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau yang sesuai Standar”**, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polda Kepulauan Riau;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengirim personel Polda Kepulauan Riau untuk mengikuti Dikbangspes fungsi.
(giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP4/prom1);
- b) melaksanakan program latihan fungsi teknis Kepolisian.
(giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP5/prom1)
- c) pelatihan peningkatan kemampuan personil Polda Kepulauan Riau tentang penguasaan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan.
(giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP5/prom1);
- d) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polda Kepulauan Riau.
(giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP4/prom1);
- e) pelaksanaan program pelatihan revolusi mental (giat 3100/prog 5).
(giat3100/prog5/SP2/ SS4/IKP5/prom1).

- 2) pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan kampanye penerimaan personel Polri (Taruna Akpol, SIPSS, Bintara, Tamtama dan PNS Polri) secara massive untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas.
(giat3107/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom1,11);
- b) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kepulauan Riau secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis

- (BETAH) serta clear and clean, prestasi dan inovasi dengan menggunakan aplikasi secara online.
- (giat3107/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom1,11);
- c) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personel Polda Kepulauan Riau secara merryt system.
- (giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom1);
- d) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment Center dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel.
- (giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6);
- e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas.
- (giat3105/prog6/SP47/SS4/IKP4/prom6);
- f) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel.
- (giat3110/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6).
- 3) penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polda Kepulauan Riau;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada Satfung dan Satwil jajaran Polda Kepulauan Riau.
- (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP11/prom6);
- b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja.
- (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP11/prom6);
- c) mengusulkan peningkatan Tipologi Polres, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polda Kepulauan Riau.
- (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP11/prom6);
- d) mengusulkan pembentukan Polsubsektor jajaran Polda Kepulauan Riau.
- (giat5052/prog1/SP6/SS7/IKP11/prom6);
- e) mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta barelang, Polres Tanjungpinang, Karimun dan Kepulauan Anambas.
- (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP11/prom6).
- 4) Peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement:
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Pelaksanaan aplikasi SMAP.
- (giat5054/prog1/SP4/SS7/IKP12,13,16/prom6);
- b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement.
- (giat5060/prog2/SP4/SS7/IKP12/prom6).

- 5) Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT di setiap satuan kerja.
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan sistem teknologi informasi di satker jajaran Polda Kepulauan Riau.
(giat5055/prog1/SP4/SS8/IKP15,16/prom2);
 - b) penambahan kapasitas Bandwidth untuk satker-satker Polda dan jajaran.
(giat5055/prog1/SP4/SS8/IKP15/prom2);
 - c) meningkatkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART).
(giat5056/prog1/SP4/SS8/IKP15,16/prom4);
 - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja.
(giat5054/prog1/SP4/SS8/IKP15/prom4);
 - e) meningkatkan pengawasan SDM.
(giat3107/prog6/SP4/SS8/IKP15/prom4);
 - f) meningkatkan penerapan reward and punishment di satuan kerja.
(giat3105/prog6/SP4/SS8/IKP15,16/prom4).
- 6) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK Online.
(giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6);
 - b) meningkatkan prosentase pengisian SMK online sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel.
(giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6).
- 7) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polda Kepulauan Riau:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur Polda Kepulauan Riau dan masyarakat umum.
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP3/prom5);
 - b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polda Kepulauan Riau.
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP3/prom5);
 - c) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara Polda Kepulauan Riau dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS).
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP3/prom5);

d. peningkatan.....

- d) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes.
 (giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP3/prom5);
- e) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kepulauan Riau.
 (giat3072/prog1/SP4/SS4/IKP4/prom5).
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Peningkatan sarana prasarana Polda Kepulauan Riau”, yaitu:
- 1) Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan Alat Materil Khusus (Almatsus) Polda Kepulauan Riau;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Polda Kepulauan Riau yang ideal;
 (giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom6);
 - b) penyusunan standardisasi perlengkapan Polda Kepulauan Riau yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah sebagai wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan yang diselaraskan dengan tantangan tugas.
 (giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom6);
 - c) Pengusulan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Kepulauan Riau modern berbasis teknologi informasi
 (giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP7/prom6);
 - d) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materil yang sudah ada.
 (giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP7/prom6).
 - 2) Meningkatkan Sarana prasarana perairan dan perbatasan;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan pemetaan terhadap kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Kepulauan Riau sesuai karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom4);
 - b) pemenuhan kebutuhan Alpalkam dan Almatsus perairan, Kepulauan dan perbatasan secara bertahap.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom4);
 - c) mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor serta pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni secara bertahap.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
 - d) mengusulkan pembangunan Dermaga/pangkalan kapal pada Ditpolair dan setiap Polres/Polsek/Polsubsektor.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
 - e) mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepulauan Riau.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom4);

- f) Peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom4);
- g) Pemenuhan sarana prasarana Bhabinkamtibmas di wilayah perbatasan.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP6/prom4);
- h) pergelaran Alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegrasi antara Polda dan Polres.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP7/prom4);
- i) Penguatan sistem trengking untuk kelancaran traffic system komunikasi radio.
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP7/prom4).
- 3) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polda Kepulauan Riau serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah kepulauan dan perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengusulkan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Kepulauan Riau.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
- b) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
- c) mempermudah personel Polda Kepulauan Riau untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang/developer.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
- d) melakukan inventarisasi kondisi riil atas Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
- e) Mengusulkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4);
- f) menyusun Renbut Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah kepulauan dan Perbatasan.
 (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP8/prom4).
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Regulasi dan Sistem Pengawasan Polda Kepulauan Riau yang Efektif dan terpercaya**”, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat.
 (giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP17/prom10);
- b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (melalui Email).
 (giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP17/prom10);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal.

(giat)

- (giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP17/prom10);
- d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polda Kepulauan Riau di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka.
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP17/prom10);
- e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP17/prom10)..
- 2) Penguatan Saber Pungli;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Kepulauan Riau melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
(giat3088,3090,3091/prog3/SP6/SS9/IKP4/prom10);
- b) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Polda Kepulauan Riau.
(giat3088,3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
- c) pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda Kepulauan Riau.
(giat3091,5064,5065/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
- d) pemberian bantuan dan nasehat hukum serta penyuluhan hukum peraturan dan perundang-undangan terkait saber pungli.
(giat3154/prog 13/SP6/SS9/IKP18/prom10).
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polda Kepulauan Riau;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri.
(giat3088/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom 1);
- b) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polda Kepulauan Riau yang wajib melapor.
(giat3088/prog3/SP6/SS9/IKP18/prog 1);
- c) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat.
(giat3090/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom11);
- d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polda Kepulauan Riau.
(giat3088/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom11);
- e) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian.

- 2) Penyediaan informasi kepada masyarakat secara online;
 - 3) Memberikan pelayanan fungsi penatausahaan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari – hari di lingkungan Bidhumas;
 - 4) meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat kerjasama dengan pers/mass media.
- b. Sasaran strategi **“Meningkatnya profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar dapat melaksanakan tugas secara profesional”** di capai dengan kebijakan dan strategi:
- 1) **Arah kebijakan** “Meningkatkan profesionalisme Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan strategi:
 - a) Memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi guna meningkatkan kompetensi Personel Bidhumas sehingga kedepan diharapkan sudah banyak yang memiliki kualifikasi tertentu khususnya yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban masing – masing Personel;
 - b) Membina dan meningkatkan moral dan disiplin Personel agar dalam melaksanakan tugas khususnya pelayanan dan pengamanan dapat menampilkan sikap dan perilaku terpuji;
 - c) Meningkatkan kemampuan Personel baik dari aspek kognitif (pengetahuan) maupun keterampilan (skill) agar anggota dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan profesional;
 - d) Meningkatkan perawatan Personel baik dalam bidang pemenuhan hak, karier, kesejahteraan dan kesehatan personil;
 - e) Pemberian reward dan punishment sebagai motivasi kepada anggota yang berprestasi maupun yang melanggar.
- c. Sasaran prioritas **“Meningkatnya kerjasama antar Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, instansi terkait dan media massa dalam rangka memelihara kamtibmas”** dicapai melalui kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Meningkatnya kerjasama sesama Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dengan strategi :
 - a) Memperkuat solidaritas internal melalui internalisasi kecintaan pada organisasi, membangun komunikasi terbuka antar pimpinan dengan pimpinan dan pimpinan dengan bawahan;
 - b) Saling koordinasi antar Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas agar dapat melaksanakan tugas dengan optimal;
 - 2) **Arah kebijakan** “Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (bersinergi) dengan strategi:
 - a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - b) Meningkatkan sinergitas dalam menciptakan sitkamtibmas.

d. Sasaran.....

- d. Sasaran prioritas “**Terpenuhinya jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengisi ruang jabatan yang kosong sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas**” dicapai melalui kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “ Memenuhi jumlah Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk pengisian ruang jabatan yang kosong” dengan strategi:
 Mengajukan Nota dinas ke Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk permintaan Personel pengisian jabatan sesuai dengan struktur organisasi Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
 - 2) **Arah kebijakan** “ Melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing - masing Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai dengan Perkap 14 tahun 2018”.
 Saling kerja sama antar sesama Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kegiatan di Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
- e. Sasaran prioritas “ **Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau**” dapat dicapai melalui kebijakan dan strategi :
- Arah kebijakan** “Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas Personel Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau” dengan strategi :
- a) Mengajukan permintaan sarana dan prasarana ruangan Multi Media untuk menunjang kelancaran kegiatan konferensi pers / press relless;
 - b) Pengajuan permintaan sarana dan prasarana ruangan Multi Media serta Alsus;
 - c) Mengajukan permintaan kendaraan operasional R2 dan R4 untuk menunjang tugas operasional Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Ideal Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

1. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan dan merealisasikan seluruh kebijakan dan sasaran prioritas diatas, Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri yang kegiatannya meliputi :**
 - 1) Penerangan Masyarakat;
 - 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri;
 - 3) Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri** yang kegiatannya, meliputi :
 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
- c. **Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** dengan kegiatan meliputi:
 Pengendalian operasi Kepolisian

2. Pagu Indikatif Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Pagu Indikatif Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada T.A 2020 sebesar **Rp.3.778.801.000,-** dengan perincian Per - Program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH
1	2	3
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Polri lainnya	Rp. 3.632.974.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Polri	Rp. 145.827.000
JUMLAH		Rp. 3.778.801.000

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Batam, 3 Januari 2020
 KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
 POLDA KEPRI



HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / /IX/REN.2.3./2019

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja TA. 2020 Satker Bidhumas Polda Kepri, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri);
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/276/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020;
 4. DIPA RKA-KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari agar melaksanakan tugas dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2020 Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau;
 2. melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kabidhumas Polda Kepulauan Riau;

SURAT PERINTAH KABIDHUMAS POLDA KEPRI
NOMOR : SPRIN/ / IX /REN.2.3/2019
TANGGAL : SEPTEMBER 2019

3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 18 s/d 30 September 2019.

Selesai.

Dikeluarkan di : Batam
pada tanggal : September 2019

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI



Drs. S. ERLANGGA

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184

Tembusan :

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Irwasda Polda Kepri.
4. Karorena Polda Kepri.
5. Kabid Propam Polda Kepri.

DAFTAR ANGGOTA TIM POKJA
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA) SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		KET
			STUKTURAL	PENUGASAN	
1.	Drs. S. ERLANGGA	KBP/69010184	KABIDHUMAS	PENANGUNG JAWAB	
2.	M.TAHANG. S.Ag	KOMPOL/76110885	KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS	KETUA	
3.	SYARIFUDDIN, SH	AKP/67040542	PAUR PENUM SUBBID PENMAS	WAKIL KETUA	
4.	WAGIYANTO	IPTU/68040310	PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN	SEKRETARIS	
5.	NORA LISTIAWATI, S.Ikom	IPDA/82080046	PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID	ANGGOTA	
6.	MEYKIE THELESSY	BRIPKA/80071172	PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
7.	RAHMAT GUNAWAN	BRIPKA/85040265	BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED	ANGGOTA	
8.	ANDI SYAHPUTRA	BRIGADIR/85091407	BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS	ANGGOTA	
9.	ROSMALA SYAFITRI NASUTION	BRIGADIR/91050021	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
10.	REXI SHABRI	BRIPTU/92100009	BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Batam
pada tanggal : September 2019

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI



Drs. S. ERLANGGA
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- /IX/REN.2.3./2019/Bidhumas

Kepada : Yth. 1. Kasubbid PID Bidhumas Polda Kepulauan Riau
2. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepulauan Riau
3. Kasubbid Multi Meida Bidhumas Polda Kepulauan Riau

Dari : Kabidhumas Polda Kepulauan Riau

Perihal : Undangan rapat pokja penyusunan Rencana Kerja Satker
Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020

1. Rujukan:
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri);
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/276/IX/2018 tanggal 17 September 2019 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020;
 - d. Keputusan Kabidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: KEP/08/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Rencana Kerja Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020;
 - e. DIPA RKA-KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini diinformasikan kepada para Kasubbid. bahwa akan dilaksanakan rapat pokja penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020 pada :
 - a. hari / tanggal : Jum'at, 20 September 2020;
 - b. pukul : 10.00 wib s/d selesai;
 - c. tempat : Ruang Bidhumas Polda Kepulauan Riau;
 - d. acara : Rapat pokja Penyusunan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Batam, September 2019

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI



Drs. S. ERLANGGA

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184

Tembusan:

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Irwasda Polda Kepri.

**NOTULEN RAPAT TIM POKJA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020
PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019**

I. DASAR

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisrenstra Polri);
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/276/IX/2018 tanggal 17 September 2019 tentang Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020;
- d. Keputusan Kepala Bidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: KEP/08/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Rencana Kerja Kabidhumas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau T.A. 2020;
- e. DIPA RKA - KL Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-060.01.2.536734/2020 tanggal 19 November 2019;
- f. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Tim Pokja Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepri TA. 2020 dilaksanakan pada:

Hari : Jumat;

Tanggal : 20 September 2019;

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai;

Tempat : di Ruang Bidhumas Polda Kepulauan Riau;

III. PIMPINAN RAPAT: Kabidhumas Polda Kepri.

IV. PESERTA RAPAT

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		KET
			STUKTURAL	PENUGASAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. S. ERLANGGA	KBP/69010184	KABIDHUMAS	PENANGUNG JAWAB	
2.	M.TAHANG. S.Ag	KOMPOL/76110885	KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS	KETUA	
3.	SYARIFUDDIN, SH	AKP/67040542	PAUR PENUM SUBBID PENMAS	WAKIL KETUA	
4.	WAGIYANTO	IPTU/68040310	PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN	SEKRETARIS	
5.	NORA LISTIAWATI, S.Ikom	IPDA/82080046	PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID	ANGGOTA	

1	2	3	4	5	6
6.	MEYKIE THELESSY	BRIPKA/80071172	PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
7.	RAHMAT GUNAWAN	BRIPKA/85040265	BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED	ANGGOTA	
8.	ANDI SYAHPUTRA	BRIGADIR/85091407	BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS	ANGGOTA	
9.	ROSMALA SYAFITRI NASUTION	BRIGADIR/91050021	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA	
10.	REXI SHABRI	BRIPTU/92100009	BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED	ANGGOTA	

V. HASIL

1. Seluruh perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Satker Bidhumas agar dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Bidhumas TA. 2020;
2. Dalam menentukan pencapaian target mengacu pada data tahun sebelumnya;
3. Alokasi Pagu Anggaran disesuaikan dengan usulan Pagu Ideal satker Bidhumas Polda Kepri TA. 2020.

VI. PENUTUP

Demikian notulen rapat Tim Pokja Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satker Bidhumas Polda Kepulauan Riau TA. 2020 ini dibuat, sebagai bahan pengambilan kebijakan Pimpinan.

Batam, September 2020

SELAKU KETUA TIM POKJA
KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS POLDA KEPRI



M. TAHANG, S.Ag
KOMISARIS POLISI NRP 76110885

DAFTAR ABSEN TIM POKJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI TA. 2020

NO.	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. S. ERLANGGA	KBP/69010184	KABIDHUMAS	
2.	M.TAHANG. S.Ag	KOMPOL/76110885	KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS	
3.	SYARIFUDDIN, SH	AKP/67040542	PAUR PENUM SUBBID PENMAS	
4.	WAGIYANTO	IPTU/68040310	PS. KAUR REN SUBBAG RENMIN	
5.	NORA LISTIAWATI, S.Ikom	IPDA/82080046	PAUR PULLAH INPRODOK SUBBID PID	
6.	MEYKIE THELESSY	BRIPKA/80071172	PS. KAUR MINTU SUBBAG RENMIN	
7.	RAHMAT GUNAWAN	BRIPKA/85040265	BAMIN URDISINDIG SUBBID MULMED	
8.	ANDI SYAHPUTRA	BRIGADIR/85091407	BAMIN UR PENUM SUBBID PENMAS	
9.	ROSMALA SYAFITRI NASUTION	BRIGADIR/91050021	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	
10.	REXI SHABRI	BRIPTU/92100009	BAMIN URPEMANALIS SUBBID MULMED	

Batam, September 2019
KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI



Drs. S. ERLANGGA
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010184

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATKER BIDHUMAS POLDA KEPRI T.A. 2020





FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

1. Nama Kementerian / Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : Bidhumas Polda Kepri
3. Misi Unit Organisasi :
 - a) Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern di bidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat
 - b) Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarpras, Sismet, anggaran menuju Front Office Polri;
 - c) Menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat dan pelaku komunikasi;
 - d) Mencari, menghimpun, mengolah, mendistribusikan, menyimpan informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah;
 - e) Mendukung kegiatan Kepolisian dan Operasi Kepolisian;
 - f) Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang sudah diberlakukannya UU KIP, sehingga realisasi Humas Polri sebagai Front Office perlu segera diwujudkan. Karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana prasarana berbasis TI, sistem dan metoda serta anggaran yang memadai
 - g) Menambah sarana dan prasarana penunjang guna meningkatkan kinerja anggota.
4. Sasaran Strategis :
 - a) Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepri yang efektif, profesional, bermoral, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran sarana dan prasarana;
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
5. Kode Program : 060.01.01
6. Nama Program :
 - a) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;
 - b) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Polri

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Baru

Lama

Pendanaan	Alokasi Tahun 2019	Usulan Tahun 2020	Perkiraan Kebutuhan		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1. Rupiah	3.082.729.000	4.655.305.000	5.120.836.000	5.632.919.000	6.196.211.000
a. Pendamping					
b. NonPendamping					
2. PHLN atau PDN					
JUMLAH	3.082.729.000	4.655.305.000	5.120.836.000	5.632.919.000	6.196.211.000

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil / OutCome	Indikator kinerja utama
Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepri yang efektif, profesional, bermoral, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran sarana dan prasarana	Prosentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepri
Mewujudkan peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah konferensi pers tentang kinerja Polda Kepulauan Riau dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba; b. Jumlah <i>Press Release</i> ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepulauan Riau; c. Jumlah dialog interaktif, sosialisasi dan <i>talkshow</i> melalui radio; d. Jumlah publikasi berita ke <i>website</i> Batamraya.com dan Tribatanews Polda Kepulauan Riau; e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepulauan Riau ke media sosial; f. Jumlah <i>counter opini</i> melalui media sosial; g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepulauan Riau; h. Kliping media <i>online</i> terkait pemberitaan Polda Kepulauan Riau.

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI

KODE	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	PERKIRAAN TARGET			JENIS KEGIATAN	PRIORITAS (N/KL/B/0)	KEGIATAN/TARGET BARU	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3070	Penerangan Masyarakat	Layanan Penerangan Masyarakat	a. Jumlah Konferensi pers tentang kinerja Polda Kepri dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba;	100	110	120	130				
			b. Jumlah Press Release ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepri;	325	357	389	422				
			c. Jumlah dialog Interaktif, sosialisasi dan Talkshow melalui Radio;	15	16	17	19				
			d. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepri ke Media sosial;	500	600	650	700				
			e. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepri;	350	385	420	455				
			f. Kliping Media Online terkait pemberitaan Polda Kepri	1670	1837	2004	2171				

KODE	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	PER KIRAN TARGE T	JENI S KEGI ATAN	PRIO RITA S (N/KL /B/0)	KEGIA TAN/ TARGE T BARU	PENANGGU NG JAWAB	KODE	NAMA KEGIATA N
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran	Prosentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepri	7%	11%	12%	13%				
		Layanan Perkantoran									
3149	Pengelolaan Multimedia	Terlaksananya Pengelolaan Multimedia	Jumlah publikasi berita ke Website Batamraya.com dan Tribatanews Polda Kepulauan Riau;	765	841	917	994				
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Layanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah counter informasi melalui media sosial	1360	1496	1632	1768				
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	Layanan Perkantoran									

B. PENDANAAN**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI**

KODE	NAMA KEGIATAN	ALOKASI 2020	USULAN TAHUN 2021				PERKIRAAN KEBUTUHAN			LOKASI
			RUPIAH	PLN+PDN	PNBP+BLU	JMLH	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070	Penerangan Masyarakat	288.828	317.711	-	-	-	349.482	384.430	422.873	BIDHUMAS POLDA KEPRI
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	4.152.477	4.567.725	-	-	-	5.024.497	5.024.497	6.079.642	BIDHUMAS POLDA KEPRI
3149	Pengelolaan Multimedia	20.000	22.000	-	-	-	24.200	26.620	29.282	BIDHUMAS POLDA KEPRI
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	49.000	53.900	-	-	-	59.290	65.219	71.741	BIDHUMAS POLDA KEPRI
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	145.000	159.500	-	-	-	175.450	192.995	212.295	BIDHUMAS POLDA KEPRI
TOTAL		4.655.305	5.120.836	-	-	-	5.632.919	6.196.211	6.815.832	BIDHUMAS POLDA KEPRI

Batam, Januari 2020

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI
HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KEPULAUAN RIAU
 BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA TAHUNAN BIDHUMAS POLDA KEPRI
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Postur Bidhumas Polda Kepulauan Riau yang efektif, profesional, bermoral, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran sarana dan prasarana.	Persentase penambahan personel Bidhumas Polda Kepulauan Riau.	7 %
2	Terwujudnya peningkatan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.	a. Jumlah konferensi pers tentang kinerja Polda Kepulauan Riau dalam pengungkapan kasus kejahatan Konvensional dan Narkoba; b. Jumlah <i>Press Release</i> ke media Konvensional terkait kinerja Polda Kepulauan Riau; c. Jumlah dialog interaktif, sosialisasi dan <i>talkshow</i> melalui radio; d. Jumlah publikasi berita ke <i>website</i> Batamraya.com dan Tribatanews Polda Kepulauan Riau; e. Jumlah publikasi kegiatan, informasi, dan sosialisasi Polda Kepulauan Riau ke media sosial; f. Jumlah <i>counter opini</i> melalui media sosial; g. Jumlah dokumentasi dan peliputan berkaitan dengan kegiatan Polda Kepulauan Riau;	100 Giat 325 Giat 15 Giat 765 Giat 500 Giat 1360 Giat 350 Giat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		h. Kliping media <i>online</i> terkait pemberitaan Polda Kepulauan Riau.	1670 Giat

Ditetapkan di : Batam

pada tanggal : 3 Januari 2020



KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA KEPRI

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252